



L K I P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

DPPKB KOTA BANDUNG



TAHUN 2020



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
KATA PENGANTAR.....	3
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang.....	5
B. Gambaran Umum Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	6
C. Tugas dan Fungsi	7
D. Isu Strategis.....	8
E. Landasan Hukum.....	14
F. Sistematika	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
A. Perencanaan Strategis Sebelum Reviu	16
1. Rencana Strategis	16
2. Indikator Kinerja Utama	22
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	24
B. Perencanaan Strategis Hasil Reviu	25
1. Rencana Strategis Hasil Reviu	26
2. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu	27
3. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	31
A. Kerangka Pengukuran Kinerja	31
B. Capaian Indikator Kinerja Utama	33
C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	35
D. Realisasi Kinerja dan Anggaran.....	61
BAB IV PENUTUP	67



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bandung Tahun 2020 dapat diselesaikan. Penyusunannya didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Substansi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DPPKB Kota Bandung Tahun 2020 dan maksud tujuan disusunnya LKIP adalah :

1. Sebagai media hubungan kerja organisasi yang berisi informasi dan data yang telah diolah;
2. Wujud tertulis pertanggungjawaban suatu organisasi instansi kepada pemberi wewenang dan mandat;
3. Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi instansi pemerintah; dan
4. Media informasi tentang sejauhmana penentuan prinsip-prinsip good governance termasuk penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar di instansi yang bersangkutan.

Pada akhirnya, tidak semua yang kita rencanakan berjalan sesuai dengan harapan, namun demikian dengan adanya LKIP ini kami harapkan dapat memperoleh umpan balik untuk peningkatan kinerja khususnya pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung dan melalui penerapan perbaikan fungsi-fungsi manajemen mulai dari perencanaan, pengukuran, data, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, pelaporan dan pencapaian kinerja, sehingga dapat meningkatkan keberhasilan dan meminimalisir kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab serta meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas instansi



pemerintah yang akuntabel dan yang lebih penting adalah meningkatkan kepercayaan terhadap masyarakat dan lingkungan.

Harapan kami Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bandung Tahun 2020 dapat memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya..

Bandung, 31 Desember 2020

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Bandung



Drs. H.ANDRI DARUSMAN, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19681115 198803 1 005



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan



bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun 2020 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Gambaran Umum Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bandung adalah lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang melaksanakan dua urusan, yakni urusan Pengendalian Penduduk dan Urusan Keluarga Berencana lingkup Kota Bandung. Pembentukan BPPKB Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 1981 dan Perda Nomor 24 Tahun 1981. Dalam era desentralisasi dan otonomi daerah, dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Tingkat Kota Bandung, yang mengubah nama BPPKB Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung menjadi BPPKB Kota Bandung. Perubahan tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi BPPKB kembali mengalami perubahan sesuai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 12 tahun 2007 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung. Selanjutnya berubah kembali dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang mengubah nama BPPKB Kota Bandung menjadi DPPKB Kota Bandung.



C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung mempunyai tugas dan kewajiban :

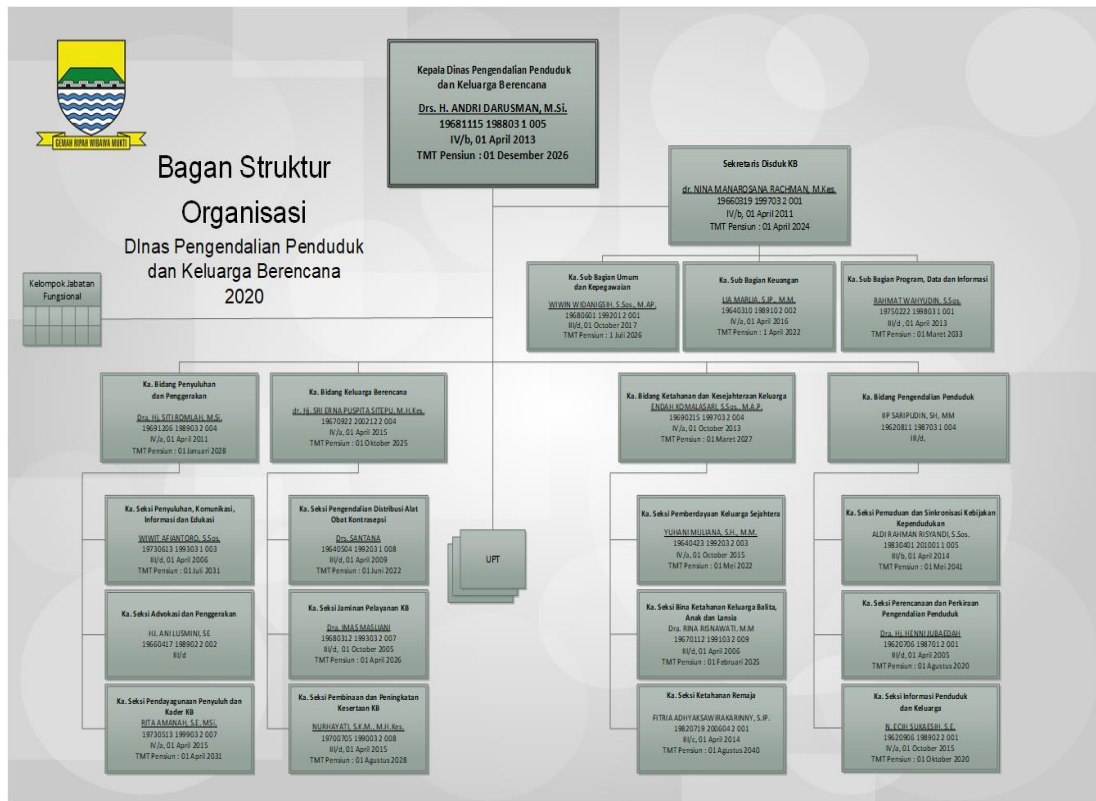
Membantu Walikota dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

1. a. perumusan kebijakan lingkup pengendalian penduduk dan keluarga berencana; b. pelaksanaan kebijakan lingkup pengendalian penduduk dan keluarga berencana; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pengendalian penduduk dan keluarga berencana; d. pelaksanaan administrasi Dinas lingkup pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.



Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh Drs. H.ANDRI DARUSMAN, M.Si yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat structural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:



D. Isu Strategis

Untuk mengetahui permasalahan yang sedang terjadi didalam proses peningkatan pemberian layanan kepada masyarakat dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, perlu dilakukan suatu analisis terhadap permasalahan-permasalahan serta isu-isu strategis. Dari permasalahan tersebut akhirnya dapat disusun Visi dan Misi dari Rencana Strategis DPPKB.

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi DPPKB

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang kewenangannya secara konkuren menjadi kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Dalam Undang -



undang ini secara tegas dijelaskan 4 (empat) Sub urusan yang menjadi kewenangan bersama, yaitu; 1) Pengendalian Penduduk, 2) Keluarga Berencana (KB), 3) Keluarga Sejahtera, serta 4) Standarisasi Pelayanan KB dan Sertifikasi Tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB). Adanya perubahan lingkungan strategis seperti perubahan pemerintahan dengan segala perubahan perilaku manajemen pemerintahan negara, perubahan peraturan perundangan yang menjadi dasar penggerak operasional program KKBPK sehingga mengubah beberapa kewenangan yang telah diserahkan ke daerah yang diatur melalui Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 dan dijadikan lampiran Undang - undang nomor 23 tahun 2014. Perubahan lingkungan strategis antara lain, tingginya tingkat keterbukaan dan aspirasi masyarakat yang mendorong kesadaran akan pentingnya perubahan kelembagaan yang melaksanakan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sesuai amanat Undang - undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan Keputusan RENSTRA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kota Bandung. Tetap merujuk pada ketentuan dalam Undang - undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Prinsip otonomi daerah dalam penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana merupakan langkah konkrit untuk mengatasi rentang kendali manajemen pelayanan program KB antara pemerintah dengan pemerintah daerah khususnya di Kabupaten/Kota. Hal ini tentunya dapat berjalan dengan baik apabila di dukung dengan peningkatan kualitas pelayanan pengendalian penduduk dan KB kepada masyarakat, yang diindikasikan dengan adanya keberpihakan ketersediaan infrastruktur instrumen regulasi yang mendukung penyelenggaraan program, penempatan Tenaga Penyuluh dan Pelayanan KB, rancang bangun program yang tertuang dalam Arah Kebijakan Umum Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Daerah (Renstrada) yang tergambar dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah - Keluarga Berencana (RKA SKPD-KB). Jika seluruh regulasi tersebut dapat disinkronkan secara harmonis, maka dapat dipastikan bahwa penyelenggaraan program semakin baik. Terkait dengan hal - hal tersebut diatas, maka perlu segera dilakukan penyempurnaan kelembagaan BKKBN di Pusat untuk menjabarkan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh Undang - undang nomor 23 tahun 2014. Rencana Strategis (Renstra) BKKBN 2018 - 2023 yang mengacu pada RPJMN 2018 - 2023



dan dijabarkan ke dalam struktur program dan anggaran melalui penetapan dan pelaksanaan program prioritas, perubahan manajemen secara berjenjang dengan penuh amanah, konsekuen dan berintegritas demi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana amanat perubahan reformasi birokrasi yang menyangkut 8 (delapan) area utama yakni (1) organisasi, (2) tatalaksana, (3) peraturan perundang undangan, (4) sumber daya manusia, (5) pengawasan, (6) akuntabilitas, (7) pelayanan publik, serta (8) monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Beberapa isu strategis dan permasalahan pengendalian kuantitas penduduk, yang harus mendapat perhatian khusus adalah:

4. Permasalahan Eksternal

- a. Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) pelaksanaannya masih dihadapkan dengan beberapa permasalahan antara lain: (1) masih lemahnya komitmen dan dukungan stakeholders terhadap program KKBPK, yaitu terkait kelembagaan, kebijakan, perencanaan program dan penganggaran; (2) masih tingginya jumlah anak yang diinginkan dari setiap keluarga, yaitu sekitar 2,7 sampai dengan 2,8 anak atau di atas angka kelahiran total sebesar 2,6 (SDKI 2012), angka ini tidak mengalami penurunan dari tahun 2002 (TFR 2,6; SDKI 2002-2003); (3) pelaksanaan advokasi dan KIE belum efektif, ditandai dengan pengetahuan tentang KB dan alat kontrasepsi sangat tinggi (98% dari Pasangan Usia Subur/PUS), namun tidak diikuti dengan perilaku untuk menjadi peserta KB 57,9% (SDKI 2012). Disamping itu, masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang isu kependudukan, hanya sebesar 34,2 persen (Data BKKBN 2013); (4) masih terjadinya kesenjangan dalam memperoleh informasi tentang program KKBPK baik antar provinsi, antara wilayah perdesaan - perkotaan maupun antar tingkat pendidikan dan pengeluaran keluarga; (5) pelaksanaan advokasi dan KIE mengenai KB yang belum responsif gender, tergambar dengan masih dominannya peran suami dalam pengambilan keputusan untuk ber-KB; (6) muatan dan pesan dalam advokasi dan KIE belum dipahami secara optimal; serta (7) peran bidan dan tenaga lapangan KB dalam konseling KB belum optimal. Berdasarkan data SDKI 2012, hanya sebesar 5,2 persen wanita kawin yang dikunjungi petugas lapangan KB dan berdiskusi tentang KB, sedangkan



88,2 persen wanita kawin tidak berdiskusi tentang KB dengan petugas KB atau provider.

- b. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang Merata untuk dapat mengatasi permasalahan pelayanan KB, antara lain: (1) Angka pemakaian kontrasepsi cara modern tidak meningkat secara signifikan, yaitu dari sebesar 56,7 persen pada tahun 2002 menjadi sebesar 57,4 persen pada tahun 2007, dan pada tahun 2012 meningkat menjadi sebesar 57,9 persen; (2) Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) masih tinggi, yaitu sebesar 8,5 persen atau 11,4 persen apabila dengan menggunakan metode formulasi baru; (3) Masih terdapat kesenjangan dalam kesertaan ber-KB (contraceptive prevalence rate/CPR) dan kebutuhan ber-KB yang belum terpenuhi (unmet need), baik antar provinsi, antar wilayah, maupun antar tingkat pendidikan, dan antar tingkat pengeluaran keluarga; (4) Tingkat putus pakai penggunaan kontrasepsi (drop out) masih tinggi, yaitu 27,1 persen; (5) Penggunaan alat dan obat Metode Kontrasepsi Jangka Pendek (non MKJP) terus meningkat dari 46,5 persen menjadi 47,3 persen (SDKI 2007 dan 2012), sementara Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) cenderung menurun, dari 10,9 persen menjadi 10,6 persen (atau 18,3 persen dengan pembagi CPR modern); (6) rendahnya kesertaan KB Pria, yaitu sebesar 2,0 persen (SDKI 2007 dan 2012); (7) kualitas pelayanan KB (supply side) belum sesuai standar, yaitu berkaitan dengan ketersediaan dan persebaran fasilitas kesehatan/klinik pelayanan KB, ketersediaan dan persebaran tenaga kesehatan yang kompeten dalam pelayanan KB, kemampuan bidan dan dokter dalam memberikan penjelasan tentang pilihan metode KB secara komprehensif termasuk mengenai efek samping alokon dan penanganannya, serta komplikasi dan kegagalan. Selanjutnya yang berkenaan dengan ketersediaan dan distribusi alokon di fasilitas kesehatan (faskes)/klinik pelayanan KB (supply chains); (8) Jaminan pelayanan KB belum seluruhnya terpetakan pada fasilitas pelayanan KB, terutama dalam rangka pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan.
- c. Peningkatan pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga sangat penting dalam upaya mengendalikan jumlah kelahiran dan menurunkan resiko kematian



Ibu melahirkan. Permasalahan kesehatan reproduksi remaja, antara lain: (1) Angka kelahiran pada perempuan remaja usia 15-19 tahun masih tinggi, yaitu 48 per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (SDKI 2012), dan remaja perempuan 15-19 tahun yang telah menjadi ibu dan atau sedang hamil anak pertama meningkat dari sebesar 8,5 persen menjadi sebesar 9,5 persen (SDKI 2007 dan SDKI 2012) ; (2) Masih banyaknya perkawinan usia muda, ditandai dengan median usia kawin pertama perempuan yang rendah yaitu 20,1 tahun (usia ideal pernikahan menurut kesehatan reproduksi adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi pria); (3) terdapat kesenjangan dalam pembinaan pemahaman remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) yang tergambar pada tingkat kelahiran remaja (angka kelahiran remaja kelompok usia 15-19 tahun); (4) Tingginya perilaku seks pranikah di sebagian kalangan remaja, berakibat pada kehamilan yang tidak diinginkan masih tinggi; (5) Pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi dan perilaku beresiko masih rendah; serta (6) Cakupan dan peran Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) belum optimal.

- d. Pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang ditandai dengan peningkatan pemahaman dan kesadaran fungsi keluarga. Dalam rangka pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pembinaan kelestarian kesertaan ber-KB masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara lain: (1) Masih tingginya jumlah keluarga miskin, yaitu sebesar 43,4 persen dari sebanyak 64,7 juta keluarga Indonesia (Keluarga Pra Sejahtera/KPS sebesar 20,3 persen dan Keluarga Sejahtera I/KS-1 sebesar 23,1 persen (Pendataan Keluarga, BKKBN 2012); (2) Pengetahuan orang tua mengenai cara pengasuhan anak yang baik dan tumbuh kembang anak masih rendah; (3) Partisipasi, pemahaman dan kesadaran keluarga/orang tua yang memiliki remaja dalam kelompok kegiatan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga masih rendah; (4) Kualitas hidup Lanjut usia (lansia) dan kemampuan keluarga dalam merawat lansia masih belum optimal; (5) Terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling ketahanan dan kesejahteraan keluarga; (6) Pelaksanaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga akan peran dan fungsi



- kelompok kegiatan belum optimal dalam mendukung pembinaan kelestarian kesertaan ber-KB. Disamping itu, Kelompok Kegiatan/Poktan, yang terdiri dari: Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) belum optimal dalam memberikan pengaruh kepada masyarakat akan pentingnya ber-KB/pelestarian Peserta KB Aktif (PA); dan (7) Terbatasnya materi program KKBPK dalam kelompok kegiatan serta terbatasnya jumlah dan kualitas kader/tenaga kelompok kegiatan.
- e. Penguatan landasan hukum dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembangunan bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB). Penguatan landasan hukum dan penyerasian kebijakan pembangunan bidang KKB memiliki beberapa permasalahan, antara lain: (1) Landasan hukum dan penyerasian kebijakan pembangunan bidang KKB belum memadai, yaitu masih terdapat beberapa peraturan pemerintah dari UU nomor 52 tahun 2009 yang belum disusun dan ditetapkan, dan masih banyak kebijakan pembangunan sektor lain yang tidak sinergi dengan pembangunan bidang KKB; (2) Komitmen dan dukungan pemerintah pusat dan daerah terhadap kebijakan pembangunan bidang KKB masih rendah, yaitu kurangnya pemahaman pemerintah pusat dan daerah tentang program KKBPK, dan belum semua kebijakan perencanaan program dan penganggaran yang terkait dengan bidang KKB dimasukkan dalam perencanaan daerah, serta peraturan perundangan yang belum sinergis dalam penguatan kelembagaan pembangunan bidang KKB; dan (3) Koordinasi pembangunan bidang KKB dengan program pembangunan lainnya masih lemah (antara lain; koordinasi dengan program bantuan pemerintah seperti Program Keluarga Harapan/PKH, Jamkesmas/Jamkesda, Jampersal, PNPM, dan SJSN Kesehatan), serta penanganan kebijakan pembangunan bidang KKB selama ini masih bersifat parsial.
- f. Penguatan Data dan Informasi Kependudukan, KB dan KS. Terdapat beberapa sumber data pembangunan kependudukan, KB dan KS, diantaranya administrasi kependudukan yang mencatat registrasi pendudukan dan registrasi vital; sensus penduduk dan beberapa survei terkait bidang kependudukan dan KB; serta data sektoral pembangunan



kependudukan dan KB termasuk data - data kajian dan evaluasi pembangunan Kependudukan dan KB. Data Sektoral memegang peranan penting dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan bidang KKB. Namun, data sektoral yang diperoleh melalui statistik rutin pendataan kependudukan, KB, dan keluarga belum dapat digunakan secara optimal dalam pengawasan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi program KKBPK, dikarenakan sistem pengolahan data masih kurang berkualitas. Beberapa permasalahan diatas memberikan informasi yang cukup mendalam tentang pencapaian Program KKBPK secara nasional selama lima tahun terakhir

E. Landasan Hukum

LKIP Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013 - 2018.



F. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandung Kota Bandung Tahun 2020 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reuiu.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Perencanaan Strategis Sebelum Reviu

1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung. Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Be Nomor Tahun tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun 2019-2023. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota Bandung terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana



telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2019-2023.

Penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2019-2023 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Visi:

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kota Bandung Tahun 2018 - 2023, yaitu:

**“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG
YANG UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA, DAN AGAMIS”**

Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut:



- Bandung** : Meliputi seluruh wilayah dan isinya. Artinya Kota Bandung dan seluruh warganya yang berada di dalam satu kawasan dalam batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1810 hingga sekarang.
- Unggul** : Dengan berbagai capaian prestasi yang telah diraih pada periode sebelumnya, maka Pemerintah Kota Bandung akan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik di setiap sektor serta tetap menjadi contoh bagi daerah lain dalam bentuk terobosan bagi pembangunan daerah. Dukungan SDM Kota Bandung yang berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian daerah, namun juga dalam mendukung pembangunan Kota Bandung.
- Nyaman** : Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, maka kualitas infrastruktur yang sudah baik harus terus ditingkatkan dengan tetap memperhatikan dampak terhadap kualitas lingkungan. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air dan udara harus terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali dengan ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya yang responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya. Kebutuhan ruang dalam konteks pelaksanaan pembangunan harus tetap berpihak terhadap lingkungan.
- Sejahtera** : Kesejahteraan lahir dan batin yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada individu, keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam arti yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan



elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik hingga menjadi teladan bagi kota lainnya.

Agamis : Merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, manifestasi dari kesempurnaan kehidupan beragama sebagai wujud perintah Tuhan bahwa tujuan akhir dari kehidupan beragama harus mampu menjadi rahmat bagi alam semesta. Terwujudnya masyarakat yang agamis adalah kondisi yang harus hadir sepanjang tahun 2018-2023. Dalam masyarakat yang agamis semua warga masyarakat mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk cara berfikir, bersikap dan berbuat. Ajaran agama tidak saja hanya dijadikan kegiatan ritual namun juga diimplementasikan ke dalam pencapaian pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sosial kemasyarakatan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana termasuk di Misi 1 (satu) RPJMD 2018-2023 Kota Bandung. Rumusan Misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Membangun Masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing

Pemerintah Kota Bandung dengan berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya, berkomitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang bermutu, adil dan merata.

Pencapaian misi 1 didukung oleh tujuan dan sasaran yang dapat dilihat pencapaiannya dari indikator kinerja. Adapun tujuan, sasaran dan indikator



kinerja yang mendukung misi 1 dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut :

A. Tujuan

Membangun masyarakat Kota Bandung yang Mandiri dengan Jaminan Pendidikan, Kesehatan dan Sosial yang Bermutu, Adil dan Merata berlandaskan Nilai-nilai Agama dan Budaya.

B. Sasaran

Dalam rangka pencapaian tujuan dari misi 1 di atas, maka dapat dilihat dari uraian sasaran strategis Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dibawah ini :

1. Meningkatnya Pengetahuan Hidup Sehat
2. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat untuk Hidup Sehat
Meningkatnya Upaya Pelayanan Kesehatan sesuai Standar

Visi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun 2019-2023 adalah :

Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis

Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun 2019-2023 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- a. Membangun Masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing
- b. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih

Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istandi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun



waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2019-2023 sebanyak 5 (lima) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung sebagai berikut :

Tabel 2.1

**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Pengendalian Penduduk Melalui Keluarga yang Berkualitas	Meningkatnya Promosi Keluarga Berencana	Jumlah peserta KB baru	2500	2625	2757	2895	3040
			Jumlah Kampung KB Aktif	20	31	40	49	58
		Meningkatnya Keluarga Berencana	Persentase Peserta KB Aktif	72.29	73.00	73.50	74.00	74.50
		Meningkatnya Ketahanan Keluarga.	Persentase Kelompok Tribina Aktif	71.06	74.56	78.26	82.16	86.26
		Meningkatnya Pengendalian Penduduk	Cakupan Data dan Informasi Kependudukan yang Akurat dan Tepat Waktu	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	70	70	80	90	100

2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota



Bandung Nomor : 03 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Bandung dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2018-2023.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Promosi Keluarga Berencana	Jumlah Kampung KB Aktif	jumlah	Target Satuan Jumlah	Kriteria Aktif :1. SK Kampung KB dari Lurah setempat2. Adanya kepengurusan kelompok di Kampung KB3. partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan KKBPK	Jumlah Kampung KB yang Aktif1. SK Kampung KB dari Lurah setempat2. Adanya kepengurusan kelompok di Kampung KB3. partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan KKBPK
2	Meningkatnya Keluarga Berencana	Persentase Peserta KB Aktif	%	Adanya Persentase PUS KB Aktif	Jumlah PUS KB Aktif dibagi Jumlah PUS dikali 100%	Persentase PUS yang ber KB Aktif
3	Meningkatnya Ketahanan Keluarga.	Persentase Kelompok Tribina Aktif	%	Kelompok Tribina tidak Semua aktif	Jumlah Kelompok Tribina yang Aktif dibagi Jumlah Kelompok	Persentase Kelompok Tribina yang AktifKriteria Aktif :1. Memiliki SK Kelompok2.



					Tribina x 100%	Memiliki Susunan Kepengurusan3. Aktif ber- Kegiatan Minimal rutin 1 (satu) bulan sekali4. Adanya kelompok2 ketahanan keluarga5. Sosialisasi dan penyuluhan
--	--	--	--	--	-------------------	--

3. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun 2020 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun 2019-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020, Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut :



Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Kota Bandung
Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Promosi Keluarga Berencana	Jumlah peserta KB baru	2750
		Jumlah Kampung KB Aktif	31
2	Meningkatnya Keluarga Berencana	Persentase Peserta KB Aktif	73.00
3	Meningkatnya Ketahanan Keluarga.	Persentase Kelompok Tribina Aktif	74.56
4	Meningkatnya Pengendalian Penduduk	Cakupan Data dan Informasi Kependudukan yang Akurat dan Tepat Waktu	100
5	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	70

B. Perencanaan Strategis Hasil Reviu

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar perencanaan kinerja dan penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi



Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2020, sebagai berikut :

1. Rencana Strategis Hasil Reviu

Hasil reviu pada rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana terutama memperhatikan indikator dan target kinerja pada seluruh sasaran dengan maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2020

Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana di lingkungan Pemerintah Kota Bandung antara lain :

Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2020 tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.4

**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya Pengendalian Penduduk Melalui Keluarga yang Berkualitas	Meningkatnya Promosi Keluarga Berencana	Jumlah peserta KB baru	jumlah	2500	2625	2757	2895	3040
			Jumlah Kampung KB Aktif	jumlah	20	31	40	49	58
		Meningkatnya Keluarga Berencana	Persentase Peserta KB Aktif	%	72.29	73.00	73.50	74.00	74.50
		Meningkatnya Ketahanan Keluarga.	Persentase Kelompok Tribina Aktif	%	71.06	74.56	78.26	82.16	86.26
		Meningkatnya Pengendalian Penduduk	Cakupan Data dan Informasi Kependudukan	%	100	100	100	100	100



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023
			yang Akurat dan Tepat Waktu						
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	70	70	80	90	100

2. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu

Bersamaan dengan reviu rencana strategis juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada table berikut :



Tabel 2.5

**Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun 2020**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
1	Meningkatnya Promosi Keluarga Berencana	Jumlah peserta KB baru	jumlah	Target satuan Jumlah	Cukup Jelas		Jumlah Akseptor KB Baru
		Jumlah Kampung KB Aktif	jumlah	Target Satuan Jumlah	Kriteria Aktif : 1. SK Kampung KB dari Lurah setempat 2. Adanya kepengurusan kelompok di Kampung KB 3. partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan KKBPK		Jumlah Kampung KB yang Aktif 1. SK Kampung KB dari Lurah setempat 2. Adanya kepengurusan kelompok di Kampung KB 3. partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan KKBPK
2	Meningkatnya Keluarga Berencana	Persentase Peserta KB Aktif	%	Adanya Persentase PUS KB Aktif	Jumlah PUS KB Aktif dibagi Jumlah PUS dikali 100%		Persentase PUS yang ber KB Aktif
3	Meningkatnya Ketahanan Keluarga.	Persentase Kelompok Tribina Aktif	%	Kelompok Tribina tidak Semua aktif	Jumlah Kelompok Tribina yang Aktif dibagi Jumlah Kelompok Tribina x 100%		Persentase Kelompok Tribina yang Aktif Kriteria Aktif : 1. Memiliki SK Kelompok 2. Memiliki Susunan Kepengurusan 3. Aktif ber-Kegiatan Minimal rutin 1 (satu) bulan sekali 4. Adanya kelompok 2 ketahanan keluarga 5.



Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
							Sosialisasi dan penyuluhan
4	Meningkatnya Pengendalian Penduduk	Cakupan Data dan Informasi Kependudukan yang Akurat dan Tepat Waktu	%	Laporan Data dan Informasi Keluarga yang akurat harus 100% setiap bulan	Jumlah Laporan dibagi jumlah Bulan pertahun dikali 100%		Jumlah Laporan Dokumen Statistik Rutin KB
5	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	Point IKM baik	Cukup Jelas		Point IKM Meningkat



3. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana hasil reviu dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dengan Walikota Bandung dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Hasil Reviu
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun
2020

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Promosi Keluarga Berencana	Jumlah Kampung KB Aktif	jumlah	31
2	Meningkatnya Keluarga Berencana	Persentase Peserta KB Aktif	%	73.00
3	Meningkatnya Ketahanan Keluarga.	Persentase Kelompok Tribina Aktif	%	74.56



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2020 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu



atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Merah
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Hijau
> 100%	Melebihi Target	Biru

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

**Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung
Tahun 2020**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	Biru Tua
2	Baik	75.00 – 89.99	Hijau
3	Cukup	65.00 – 74.99	Jingga
4	Kurang	50.00 – 64.99	Kuning
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	Merah



Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2019-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2020. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2020, hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor :, telah ditetapkan sebanyak 3 sasaran dan sebanyak 3 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari “Meningkatnya Promosi Keluarga Berencana” dengan 1 indikator “Jumlah Kampung KB Aktif”;
- Sasaran 2 terdiri dari “Meningkatnya Keluarga Berencana” dengan 1 indikator “Persentase Peserta KB Aktif”;
- Sasaran 3 terdiri dari “Meningkatnya Ketahanan Keluarga” dengan 1 indikator “Persentase Kelompok Tribina Aktif”.

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.



Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 900/656-DPPKB/2020 tanggal 30 Januari 2020 dan melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor :.. tentang Indikator Kinerja Utama Kota Bandung. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung tahun 2020 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung
Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah Kampung KB Aktif	jumlah	31	31	100.00
2	Persentase Peserta KB Aktif	%	73.00	76.24	104.44
3	Persentase Kelompok Tribina Aktif	%	74.56	74.73	100.23

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator Persentase Peserta KB Aktif, dengan capaian kinerja 104.44 %, pada indikator Persentase Kelompok Tribina Aktif, dengan capaian kinerja 100.23 %.

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada indikator Jumlah Kampung KB Aktif, dengan capaian kinerja 100 %.



C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2019-2023. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun 2019-2023 sebanyak 5 sasaran.

Tahun 2020 adalah tahun ke 2 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, dari sebanyak 5 sasaran strategis dengan sebanyak 6 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun
2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah peserta KB baru	jumlah	2625	3410	129.90
2	Jumlah Kampung KB Aktif	jumlah	31	31	100.00
3	Persentase Peserta KB Aktif	%	73.00	76.24	104.44
4	Persentase Kelompok Tribina Aktif	%	74.56	74.73	100.23
5	Cakupan Data dan Informasi Kependudukan yang Akurat dan Tepat Waktu	%	100	100	100.00
6	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	70	87.10	124.43

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa table berikut :



Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun
2020

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	66.67 %
2	Sesuai Target	33.33 %
3	Tidak Mencapai Target	0.00 %

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 5 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pencapaian target Misi

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	5	3	60.00	2	40.00	0	0.00
2	Misi 2	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00
	Jumlah	6	4	66.67	2	33.33	0	0.00

Dari sebanyak 5 sasaran dengan sebanyak 6 indikator kinerja, pencapaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 3.5

Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
A.	Misi 1	5	
1	Melebihi/Melampaui Target	3	60.00 %
2	Sesuai Target	2	40.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %
B.	Misi 2	1	
1	Melebihi/Melampaui Target	1	100.00 %
2	Sesuai Target	0	0.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2020 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 5 sasaran dan sebanyak 6 indikator kinerja dari sebanyak 2 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung tahun 2019-2023, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :



Sasaran 1

Meningkatnya Promosi Keluarga Berencana

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Promosi Keluarga Berencana

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Jumlah peserta KB baru	jumlah	2500	2528	101.12	2625	3410	129.90
2	Jumlah Kampung KB Aktif	jumlah	20	14	100.00	31	31	100.00

Sasaran Meningkatnya Promosi Keluarga Berencana dapat dilihat dari sebanyak 2 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Jumlah peserta KB baru" adalah sebesar 3410 dari target sebesar 2625 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 129.90 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Jumlah peserta KB baru" tahun ini meningkat 28.78 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 101.12

Tahun 2020 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Jumlah peserta KB baru" tahun ini adalah sebesar 129.90 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana maka capaian kinerjanya mencapai 112.17 %.

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Jumlah Kampung KB Aktif" adalah sebesar 31 dari target sebesar 31 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Tahun 2020 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Jumlah Kampung KB Aktif" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan



target akhir renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana maka capaian kerjanya mencapai 53.45 %.

Sasaran Meningkatnya Promosi Keluarga Berencana dapat dilihat dari sebanyak 2 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Jumlah peserta KB baru" adalah sebesar 3410 peserta KB baru, dari target sebesar 2625 yang direncanakan dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 129.90. %, capaian ini berhasil melebihi target yang ditetapkan. Tahun 2020 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Jumlah peserta KB baru" tahun ini adalah sebesar 129.90 %, bila dibandingkan dengan capaian kinerja renstra tahun 2019 sebesar 101.12% maka terjadi peningkatan capaian kinerja sebesar 28.78 % di tahun 2020.

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Jumlah Kampung KB Aktif" adalah sebesar 31 Kampung KB dari target sebesar 31 yang direncanakan dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kerjanya berhasil mencapai 100.00 %, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Tahun 2020 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Jumlah Kampung KB Aktif" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir dan capaian renstra tahun 2019 Jumlah Kampung KB Aktif tercapai 20 Kampung KB, maka capaian kenaikan kinerja bertambah sebanyak 11 Kampung KB Aktif atau sebesar 55 % di tahun 2020.

Adapun faktor pendukung tercapainya sasaran kinerja Meningkatnya Promosi Keluarga Berencana pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Upaya yang dilakukan dengan optimalisasi sarana prasarana yang ada di tengah kendala global yang kita hadapi bersama yaitu, pandemi covid19, sehingga upaya promosi Keluarga Berencana dapat dilaksanakan dengan optimalisasi pemanfaatan KB Safari, yang dilaksanakan secara rutin melakukan sosialisasi secara langsung ke setiap wilayah Kecamatan dengan menggunakan Mobil Unit Penerangan (MUPEN).
2. Upaya yang dilakukan dengan optimalisasi kerjasama dan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak terkait sehingga Jumlah Kampung KB Aktif dapat terpenuhi, bahkan Kota Bandung berhasil meraih penghargaan sebagai Juara Terbaik ke-1



dalam Perlombaan Kampung KB Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2020, melalui Kampung KB Ngahiji Kelurahan Cibangkong Kecamatan Batununggal Kota Bandung.

3. Dengan terberdayakannya para petugas penyuluh di Lini Lapangan yang berpengaruh besar atas tercapainya sasaran, sebagai ujung tombak atau penggerak program KB di tingkat RW sampai di tingkat Kecamatan.

DOKUMENTASI :

Gambar 1. Pelayanan Peserta KB Baru



Gambar 2. Pembinaan di Kampung KB Aktif





DATA DUKUNG :

Daftar Nama-nama Kampung KB Aktif Tahun 2020

NO	NAMA KAMPUNG KB	ALAMAT KAMPUNG KB			TAHUN PEMBENTUKAN	REGULASI	
		RW	DESA	KECAMATAN		NOMOR SK	PEJABAT PENANDATANGAN SK
1	Barokah	05	Sukarasa	Sukasari	2017	43/VIII/2017	Lurah
2	Amanah	06	Isola		2018		Lurah
3	Sejahtera	02	Cipedes	Sukajadi	2017	15/CIP/IX-17	Lurah
4	Serasi Sinergi Mandiri	02	Sukawarna		2018		
5	Kreatif	02	Sukagalih		2018	02/2018	Lurah
6	Pajajaran Sauyunan	06	Pajajaran	Cicendo	2017	466/03/PJJR	Lurah
7	Nusa Indah	04	Sukaraja		2018	144/SKRJ/KPKB	Lurah
8	Flamboyan	09	Ciumbuleuit	Cidadap	2017	911.42/VIII/2019	Lurah
9	Erma	05	Ledeng		2018	21/11/2018	Lurah
10	Sauyunan	09	Dungus Cariang	Andir	2017	24/X/2017	Lurah
11	Mawar Mekar	06	Campaka		2018		Lurah
12	RW 15	15	Tamansari	Bandung Wetan	2017	10.b/KPKB RW.15/X/TAM SAR/2017	Lurah
13	Lingga Mustika	16	Tamansari		2018		Lurah
14	Satata Sariksa	08	Lebak Siliwangi	Coblong	2017	06/CBL/SLWG/III/2018	Lurah
15	Sabanda Sariksa	02	Sekeloa		2018	400/30/SKL	Lurah
16	Bahtera	10	Kebon Pisang	Sumur Bandung	2017	660/23.SK.KBPS	Lurah
17	Mawar	03	Babakan Ciamis		2018	12B/BBC/X/2018	Lurah
18	Ya.. Ya.. Ya..	14	Cigadung	Cibeunying Kaler	2017	188.45/160/405.21/2017	Lurah
19	Anyelir	08	Neglasari		2018	188.45/15/405.21/2018	Lurah
20	Budiasih	09	Cicadas	Cibeunying Kidul	2017	33/Ke.KKB/CCDS/2017	Lurah
21	Semuanya Indah	12	Pasirlayung		2018		Lurah
22	Keluarga Cerdas	08	Sukapada		2018		
23	Sabilulungan	04	Karasak	Astana Anyar	2017	13 TAHUN 2017	Lurah
24	Endah Djaja	05	Nyengseret		2018		Lurah
25	Mawar	01	Babakan	Babakan Ciparay	2017	441/011/2017	Lurah
26	Gema - Sukahaji	03	Sukahaji		2018		Lurah
27	Lumbung	03	Babakan Ciparay		2017	062/008/SK/I/2017	Lurah
28	Restu Ibu	03	Babakan Tarogong		2017	411.1/Kep-14/V/III Batar.2018	Lurah



NO	NAMA KAMPUNG KB	ALAMAT KAMPUNG KB			TAHUN PEMBENTUKAN	REGULASI	
		RW	DESA	KECAMATAN		NOMOR SK	PEJABAT PENANDATANGAN SK
29	Dewi Pramanik	01	Suka Asih		2018	411.1/15/SK-KELSKA/XI	Lurah
30	Mutiara Hati	03	Cibaduyut	Bojongloa Kidul	2017	148/049-Kel.Cib	Lurah
31	Kadeudeuh	07	Situsaeur		2016	440/Kep.662-BPPKB/2016	Lurah

Sasaran 2

Meningkatnya Keluarga Berencana

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.7
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Keluarga Berencana

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Peserta KB Aktif	%	72.29	75.28	104.14	73.00	76.24	104.44

Sasaran Meningkatnya Keluarga Berencana dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase Peserta KB Aktif" adalah sebesar 76.24 dari target sebesar 73.00 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 104.44 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase Peserta KB Aktif" tahun ini meningkat 0.30 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 104.14

Tahun 2020 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase Peserta KB Aktif" tahun ini adalah sebesar 104.44 %, bila dibandingkan dengan target



akhir renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana maka capaian kerjanya mencapai 102.34 %.

Sasaran Meningkatnya Keluarga Berencana dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase Peserta KB Aktif" adalah sebesar 76.24% dari target sebesar 73.00% yang ditetapkan dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 104.44 %, capaian ini melebihi target yang ditetapkan. Tahun 2020 merupakan tahun ke 2 renstra, bila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator Persentase Peserta KB Aktif tahun 2019 sebesar 75.28 % dengan capaian kinerja 104,04%, maka dengan Capaian target akhir renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2020 mengalami kenaikan sebanyak 00.40 %.

Adapun faktor pendukung tercapainya sasaran kinerja Meningkatnya Keluarga Berencana pada tahun 2020, antara lain :

1. Adanya dukungan sarana operasional pergerakan pelayanan KB baru berupa pelayanan KB safari melalui Mobil Unit Pelayanan (MUYAN) yang dilaksanakan pada bulan Januari dan Februari 2020, sebelum tersebarnya pandemi Covid 19.
2. Langkah selanjutnya setelah terjadinya pandemi wabah Covid19 pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana dilanjutkan pelaksanaannya melalui fasilitas kesehatan masyarakat seperti, puskesmas praktik bidan dan balai kesehatan lainnya.
3. Selain itu dengan terbedayakannya para petugas ini lapangan yang selalu bergerak di setiap wilayah Kecamatan secara rutin, yang berpengaruh besar atas tercapainya sasaran, dimana mereka sebagai ujung tombak penggerak program KB di tingkat RW sampai di tingkat Kecamatan.

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Pesentase Peserta KB Aktif pada tahun 2020 adalah sebesar 76,24% sedangkan capaian realisasi kinerja di tingkat Provinsi Jawa Barat adalah sebesar.

DOKUMENTASI :

Gambar 3. Kegiatan Pelayanan dan Pembinaan Peserta KB aktif

**Sasaran 3**

Meningkatnya Ketahanan Keluarga.

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.8
Analisis Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya Ketahanan Keluarga.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Kelompok Tribina Aktif	%	71.06	71.07	100.01	74.56	74.73	100.23

Sasaran Meningkatkan Ketahanan Keluarga. dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase Kelompok Tribina Aktif" adalah sebesar 74.73 dari target sebesar 74.56 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja



Tahun 2020 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.23 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase Kelompok Tribina Aktif" tahun ini meningkat 0.22 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 100.01

Tahun 2020 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase Kelompok Tribina Aktif" tahun ini adalah sebesar 100.23 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana maka capaian kinerjanya mencapai 86.63 %.

Sasaran Meningkatkan Ketahanan Keluarga. dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator sasaran 3 "Persentase Kelompok Tribina Aktif" adalah sebesar 74.73 dari target sebesar 74.56 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.23%, capaian ini sesuai target yang ditetapkan. Tahun 2020 adalah tahun ke 2 renstra, bila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator tahun 2019 sebanyak 71.07% tercapai 100.0%, maka ada kenaikan capaian kinerja 00.01% pada tahun 2020.

Adapun faktor pendukung tercapainya sasaran kinerja Meningkatkan Meningkatkan Ketahanan Keluarga pada tahun 2020, antara lain :

1. Adanya dukungan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dari Dana Alokasi Khusus, sehingga dapat terlaksananya pembinaan di tengah terjadinya pandemi Covid19, sehingga sebagian besar anggaran APBN mengalami refocusing.
2. Dengan adanya dukungan dari para petugas penyuluh di Lini Lapangan yang berpengaruh besar atas tercapainya sasaran, sebagai ujung tombak atau penggerak program KB di tingkat RW sampai di tingkat Kecamatan.

DOKUMENTASI :

Gambar 4. Pembinaan Kegiatan Kelompok Tribina



DATA DUKUNG :

Tabel Rekap Data Kelompok Tribina Yang Aktif Tahun 2020 :

NO	KEC AMA TAN	NO	NAMA KELOMPOK	ALAMAT	JUMLAH KADER	NO SK	TGL SK	K0
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Suka sari	1	BKB FLAMBOYAN	Jl. Flamboyan Sarijadi Blok 18	8	02 Tahun 2017	09 Januari 2017	K/0 Juli 2017
2		2	BKR RW 06 Kel. Sarijadi	Jalan Sarijadi blok 18	6	02 Tahun 2017	09 Januari 2017	K/0 Juli 2017
3		3	BKL FLAMBOYAN	Jalan Sarijadi blok 18	5	02 Tahun 2017	09 Januari 2017	K/0 Juli 2017
4		4	BKL MELATI	RW. 03 Kel Sarijadi Kec. Sukasari	5	04 Tahun 2018	27 Januari 2018	
5		5	BKR MELATI	RW 03 Kel. Sarijadi, Kec. Sukasari	5	03 Tahun 2018	27 Januari 2018	
6		6	BKB MELATI	RW 03 Kel. Sarijadi, Kec. Sukasari	8	05 Tahun 2018	27 Januari 2018	
7		7	BKR MELATI	JL. Graha Sarimanah, Kel. Sarijadi, Kec. Sukasari	5	03 Tahun 2018	27 Januari 2018	
8		8	BKR MIANA V	RW 02 KEL GEGERKALONG	8	06 TAHUN 2015	15 DESEMBER 2015	
9		9	BKR ANYELIR	RW 10 KEL SARIJADI	6	03 TAHUN 2019	01 April 2019	
10		10	BKR FLAMBOYAN	RW 06 KEL SARIJADI	6	02 Tahun 2017	9 JANUARI 2017	
11		11	BKR SARIWANGI	RW 04 KEL SARIJADI	5	036 TAHUN 2013	22 DESEMBER 2013	



Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

NO	KEC AMA TAN	NO	NAMA KELOMPOK	ALAMAT	JUMLAH KADER	NO SK	TGL SK	K0
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Cida dap	1	BKL SEHAT CERIA	Kpg. Nyalindung RT02/RW09 Kel. Ciumbuleuit	3			K/0 26 Juli 2017
13		2	BKB RW 09 Kel. Ciumbuleuit	RW 09 Kel. Ciumbuleuit	8	8 Tahun 2017	22 Februari 2017	
14		3	BKL RW 05	RW 05 Kelurahan Ledeng	13	6-A/ Tahun 2018	14 Februari 2018	
15		4	BKR RW 05	RW 05 Kelurahan Ledeng	13	6-B/ Tahun 2018	14 Februari 2018	
16		5	BKB WISANA	RW 05 Kelurahan Ledeng	13	06/ Tahun 2018	14 Februari 2018	
17	Suka jadi	1	BKL KENIKIR	Jl. Karang Arum Kel. Cipedes	5	46/10/tahun 2016	01 Oktober 2016	
18		2	BKL KOREJAT	Jl. Pak Elas RW 08 Kel. Cipedes	6			
19		3	BKL SAMBILOTO	Jl. Karang tineung RW 05 Kel. Cipedes	7		01 April 2016	
20		4	BKL ROSELA	Jl. Cipedes Tengah RW 06 Kel. Cipedes	7			
21		5	BKB KATLEYA	Jl. Karang Arum RT 02 Kel. Cipedes	6	46/10/ tahun 2016	01 Oktober 2016	Apr-17
22		6	BKB JASMINE	Jl. Cipedes Tengah RT06 Kel. Cipedes	6		01 Mei 2017	
23		7	BKB EDELWEIS	Jl. Karangtineung RW 05 Kel. Cipedes	6		01 April 2017	
24	Cice ndo	1	BKL HARAPAN IBU	Jalan Sukaraja II RT 01 RW 05 Kel. Sukaraja	8	39/SK.BKL/KEP./11/2016	12 November 2016	K/0 Januari 2017
25		2	BKL MAWAR II	Jalan Mentor RT 03 RW 07 Kel. Sukaraja	8	04/SK.BKL/KEP./11/2017	12 Januari 2017	K/0 Januari 2017
26		3	BKB MAWAR I	Jalan BBC RT C08 RW 02 Kel. Sukaraja	10			K/0 Januari 2017
27		4	BKB MELATI	RW 02 Kel. Sukaraja	9	05/SK.BKB/KEP./11/2016	12 November 2016	
28		5	BKB ANYELIR	Gg. Karya IV	6	007./SR/X/2016	Oktober 2016	K/0 Januari 2017
29		6	BKB MAWAR	Jl. Cidamar RT 03/ RW 07 Kel. Sukaraja	6	02/SK.BKB/Kep./11/2017	12 Januari 2017	K/0 Januari 2017
30		7	BKB HARAPAN IBU	Jalan Sukaraja II RT 01 RW 05 Kel. Sukaraja	7	08/SK.BKB/Kep./11/2017	12 November 2016	K/0 Januari 2017



Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

NO	KEC AMA TAN	NO	NAMA KELOMPOK	ALAMAT	JUMLAH KADER	NO SK	TGL SK	K0
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31		8	BKR MAWAR	Jalan Mentor RT 02 RW 07 Kel. Sukaraja	6	29/SK.BKB/Kep./11/2017	12 November 2016	K/0 Februari 2017
32		9	BKR REMAJA KREATIF	Sukaraja 2 RW 05	7			K/0 27 Januari 2017
33		10	BKR GANDA MEKAR	RW 10 Kel. Sukaraja	3	24/SK.BKR/Kep./11/2016	12 November 2016	K/0 27 Januari 2017
34		11	BKR ANYELIR	Jl. Karya IV no. 90	8	36/SK.BKR/Kep./11/2016	12 November 2016	K/0 Januari 2017
35		12	BKR BUDI ASIH II	Jl. Gunung Batu gg. Pada Asih RT 06/RW09 SUKARAJA	7	23/SK.BKR/Kep./11/2016	12 November 2016	K/0 Februari 2017
36		13	BKL MELATI	Jl. BBK Cisantur RT II/RW02	9	18/SK.BKR/Kep./11/2016	12 November 2016	K/0 27 Januari 2017
37		14	BKR BUDI ASIH I	Jl. Gunung Batu gg. Pada Asih RT 02/RW09 SUKARAJA	7	22/SK.BKR/Kep./11/2016	12 November 2016	K/0 Februari 2017
38		15	BKL BUDI ASIH	Jl. Budhi RW 03	6			K/0 Januari 2017
39		16	BKL CEMPAKA BUDI	RW 03 Kel. Sukaraja	5	17/SK.BKR/Kep./11/2016	12 November 2016	
40		17	BKL ANYELIR POS 2	RW 01 Kel. Sukaraja	7	16/SK.BKL/Kep./11/2016	12 November 2016	
41		18	BKL GANDA MEKAR	RW 10 Kel. Sukaraja	3	37/SK.BKL/Kep./11/2016	12 November 2016	
42		19	BKL MAWAR II	Jl. Mentor RT03/RW07 Kel. Sukaraja	6			K/0 Januari 2017
43		20	BKL MELATI	RW 02 Kel. Sukaraja	9	19/SK.BKR/Kep./11/2016	12 November 2016	
44		21	BKL BUDI ASIH	RW 09 Kel. Sukaraja	5	33/SK.BKL/Kep./11/2016	12 November 2016	
45		22	BKL MAWAR	RW 07 Kel. Sukaraja	7	04/SK.BKL/Kep./11/2016	12 November 2016	
46		23	BKR HARAPAN IBU	RW 05 Kel. Sukaraja	7	38/SK.BKR/Kep./11/2016	12 November 2016	
47		24	BKL ANYELIR POS 1	RW 01 Kel. Sukaraja	8	16/SK.BKL/Kep./11/2016	12 November 2016	
48		25	BKL NUSA INDAH	RW 04 Kel. Sukaraja	9	31/SK.BKL/Kep./11/2016	12 November 2016	



Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

NO	KEC AMA TAN	NO	NAMA KELOMPOK	ALAMAT	JUMLAH KADER	NO SK	TGL SK	K0
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49		26	BKR MELATI POS 2	RW 02 Kel. Sukaraja	9	30/SK.BKL/Kep./11/2016	12 November 2016	
50		27	BKR MELATI POS 1	RW 02 Kel. Sukaraja	9	28/SK.BKL/Kep./11/2016	12 November 2016	
51		28	BKB MAWAR POS 1	RW 07 Kel. Sukaraja	6	10/SK.BKL/Kep./11/2016	12 November 2016	
52		29	BKB ANGGREK	RW 06 Kel. Sukaraja	7	09/SK.BKL/Kep./11/2016	12 November 2016	
53		30	BKB NUSA INDAH	RW 04 Kel. Sukaraja	9	07/SK.BKL/Kep./11/2016	12 November 2016	
54		31	BKB GANDA MEKAR	RW 10 Kel. Sukaraja	8	14/SK.BKL/Kep./11/2016	12 November 2016	
55		32	BKB NUSA INDAH POS 2	RW 09 Kel. Sukaraja	6	13/SK.BKL/Kep./11/2016	12 November 2016	
56		33	BKB PERKUTUT	RW 08 Kel. Sukaraja	7	11/SK.BKL/Kep./11/2016	12 November 2016	
57		34	BKB BUDI ASIH POS 1	RW 09 Kel. Sukaraja	7	12/SK.BKL/Kep./11/2016	12 November 2016	
58		35	BKR CEMPAKA BUDI	RW 03 Kel. Sukaraja	5	27/SK.BKL/Kep./11/2016	12 November 2016	
59		36	BKR ASTANA EYANG I	RW 06 KEL PAJAJARAN	13	466/03/PJJR	10 Juli 2017	
60		37	BKR ASTANA EYANG II	RW 06 KEL PAJAJARAN	13	466/03/PJJR	22 MEI 2019	
61		38	BKR ASTANA EYANG III	RW 06 KEL PAJAJARAN	13	466/03/PJJR	22 MEI 2019	
62		39	BKR MELATI II	RW 04 KEL PAJAJARAN	13	466/03/PJJR	1 JANUARI 2014	
63		40	BKR MAWAR II	RW 03 KEL PAJAJARAN	13	466/03/PJJR	22 MEI 2019	
64		41	BKR DEWI SARTIKA II	RW 01 KEL PAJAJARAN	13	466/03/PJJR	3 JANUARI 2018	
65	Andir	1	BKL RW 02 Kel. Maleber	RW 02 Kel. Maleber	11		27 April 2016	
66		2	BKB SEJAHTERA	Jl. Andir RT01/RW10 Kel. Ciroyom	12	01 Tahun 2010	19 Februari 2010	K/0 Agustus 2017
67	Cobl ong	1	BKL MELATI	JL. Bagusrangin no. 8A RT01/RW07 Kel. Lebaggede	8	12/SK/III/LG 2014	10 Maret 2014	K/0 15 Agustus 2017



Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

NO	KEC AMA TAN	NO	NAMA KELOMPOK	ALAMAT	JUMLAH KADER	NO SK	TGL SK	K0
1	2	3	4	5	6	7	8	9
68		2	BKB MELATI	JL. Bagusrangin no. 8A RT01/RW07 Kel. Lebaggede	16	61/VII/Tahun 2018	9 Juli 2018	
69		3	BKR MELATI	JL. Bagusrangin no. 8A RT01/RW07 Kel. Lebaggede	14	62/VII/Tahun 2018	9 Juli 2018	
70		4	BKL MELATI	JL. Bagusrangin no. 8A RT01/RW07 Kel. Lebaggede	15	63/VII/Tahun 2018	9 Juli 2018	
71		5	BKB MELATI	JL. Bagusrangin no. 7A RT01/RW07 Kel. Lebakgede	9	11/SK/III/LG 2014	10 Maret 2014	
72		6	BKB RW.01 Cipaganti	RW. 01 Kel. Cipaganti	8	09.a/Skep/Cpgt/II/2018	13 Februari 2018	
73		7	BKR RW.01 Cipaganti	RW. 01 Kel. Cipaganti	8	09.a/Skep/Cpgt/II/2018	13 Februari 2018	
74		8	BKL RW.01 Cipaganti	RW. 01 Kel. Cipaganti	10	16/Skep/Cpgt/II/2018	13 Februari 2018	
75		9	BKB RW.02 Cipaganti	RW.02 Cipaganti	8	10.a/Skep/Cpgt/II/2018	13 Februari 2018	
76		10	BKR RW.02 Cipaganti	RW.02 Cipaganti	10	24/Skep/Cpgt/II/2018	13 Februari 2018	
77		11	BKL RW.02 Cipaganti	RW.02 Cipaganti	10	17/Skep/Cpgt/II/2018	13 Februari 2018	
78		12	BKB RW.03 Cipaganti	RW.03 Cipaganti	8	11.a/Skep/Cpgt/II/2018	13 Februari 2018	
79	Sum ur Band ung	1	BKB DAHLIA	Jalan Cibunut No 1 Kel. Kebon Pisang	18	220/SK-KEL. KBPS/VIII/2017		
80		2	BKB MAWAR	Jalan Kebon Sirih RT 01 Kel. Babakan Ciamis	8	11/SK/IX/2016	09 September 2016	K/0 5 Januari 2017
81		3	BKB DAHLIA	RT 01 RW 10 Kel. Kebon Pisang	7			K/0 2 Januari 2017
82		4	BKB ANYELIR	Jalan Lombok RT 02 RW 03 Kel. Merdeka	7	25/SK/MDK/16	20 November 2016	K/0 1 Februari 2017
83		5	BKB MAWAR	Jalan Manado RT 01 RW 09 Kel. Merdeka	12	14/SK/MDK/2017	13 FEBRUARI 2017	K/0 13 Februari 2017
84		6	BKB CEMPAKA	RT 04 RW 01 Kel. Babakan Ciamis	9			K/0 2 Januari 2017
85		7	BKR DAHLIA	Jalan Cibunut No 1 Kel. Kebon Pisang	9	441/SK/02/2017	10 Februari 2017	K/0 2 Januari 2017



Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

NO	KECAMATAN	NO	NAMA KELOMPOK	ALAMAT	JUMLAH KADER	NO SK	TGL SK	K0
1	2	3	4	5	6	7	8	9
86		8	BKR MAWAR	Jalan Manado RT 01 RW 09 Kel. Merdeka	8			K/0 5 Januari 2017
87		9	BKR MAWAR	Jalan Kebon Sirih RT 01 Kel. Babakan Ciamis	10	12/SK/ IX/ BBC/2016	09 September 2016	K/0 1 Februari 2017
88		10	BKL DAHLIA	RT 9 RW 7 Kel. Kebon Pisang	9	441/SK.04	10 MARET 2013	
89		11	BKL DAHLIA	RW 07 kel. Kebon Pisang	9	220/SK/VIII/KBPS/2017	8 Agustus 2017	
90		12	BKL MAWAR	Jalan Kebon Sirih RT 02 Kel. Babakan Ciamis	10	13/SK/IX/BBC/2016	09 September 2016	K/0 5 Januari 2017
91		13	BKL DAHLIA	Jalan Cibunut No 1 Kel. Kebon Pisang	9	441/SK/04/2017	10 Februari 2017	K/0 10 Februari 2017
92		14	BKL ANGGREK	Jalan Bangka RT 02 RW 02 Kel. Merdeka	7			K/0 2 Februari 2017
93		15	BKB MELATI	RT 01 RW 10 Kel. Kebon Pisang	7			K/0 2 Januari 2017
94		16	BKR GRADASI	RW 10 Kel. Kebon Pisang, Kec. Sumur Bandung	5	441/ SK.14-Kel.KBPS/Tahun 2018	28 Februari 2018	
95	Bandung Wetan	1	BKB KENANGA	Gg Nangka Suni RT 06 RW 18 Kel. Taman Sari	5	04. A Tahun 2016	27 Januari 2016	K/0 31 JULI 2017
96	Cibeunying Kaler	1	BKL RW 02 Kel. Neglasari	RW 02 Kelurahan Neglasari	8	123 Tahun 2016	10 Oktober 2016	
97		2	BKB Kel. Neglasari	RW 02 kel. Neglasari	3	122 Tahun 2016	25 Oktober 2016	
98		3	BKB NUSA INDAH	RW 06 Kel. Cihargeulis	13	14 B Tahun 2014	6 Agustus 2014	
99		4	BKL NUSA INDAH	RW 06 Kel. Cihargeulis	8	19 Tahun 2015	28 Agustus 2015	K/0 6 Juni 2017
100		5	BKR NUSA INDAH	RW 06 Kel. Cihargeulis	9	18 Tahun 2015	28 Agustus 2015	K/0 6 Juni 2017
101		6	BKL ASTER	RW 04 Kel. Sukaluyu	7	27 Tahun 2010	08 November 2010	K/0 6 Juni 2017
102		7	BKR ASTER	RW 04 Kel. Sukaluyu	7	27 Tahun 2010	08 November 2010	K/0 6 Juni 2017
103		8	BKB ASTER	RW 04 Kel. Sukaluyu	5	28 Tahun 2011	8 Oktober 2011	K/0 6 Juni 2017



Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

NO	KEC AMA TAN	NO	NAMA KELOMPOK	ALAMAT	JUMLAH KADER	NO SK	TGL SK	K0
1	2	3	4	5	6	7	8	9
104		9	BKL ALAMANDA	RW 05 Kel. Cigadung	9	03 B/2017	23 Juni 2017	K/0 6 Juni 2017
105		10	BKR ALAMANDA	RW 05 Kel. Cigadung	9	03 A/2017	23 Juni 2017	K/0 6 Juni 2017
106		11	BKB RW 05 Kel. Cigadung	RW 05 Kel. Cigadung	10	24 Tahun 2016	23 Januari 2017	K/0 6 Juni 2017
107		12	BKL PUSPASARI	Jl. Sukaluyu I RT05/RW06 kel. Cihaurgeulis	8			K/0 17 Juli 2017
108	Cibe unyin g Kidul	1	BKL FLAMBOYAN	RT 01 RW 03 Kel. Pasir Layung	13	445.8/Kep. 031-PSLYG/2017	13 Juli 2017	K/0 14 Juli 2017
109		2	BKB FLAMBOYAN	RT 01 RW 03 Kel. Pasir Layung	13	445.8/Kep. 029-PSLYG/2017	13 Juli 2017	K/0 14 Juli 2017
110		3	BKR FLAMBOYAN	RT 01 RW 03 Kel. Pasir Layung	13	445.8/Kep. 030-PSLYG/2017	13 Juli 2017	K/0 14 Juli 2017
111		4	BKL TERATAI	JL. BBK ANDIR	8	476/306/Kep/2016	29 Maret 2016	K/0 15 Agustus 2017
112	Asta naan yar	1	BKB SERUNI	Kelurahan Nyengseret	5	411.31/10/Kep.VIII/2017	07 Agustus 2017	
113		2	BKB HOLISTIC TANJUNG	RW 04 Kel. Nyengseret	10	49/0.Kel.Nyengseret/VI/2015	27 Juni 2015	
114	Bojo ngloa kaler	1	BKB KEMAS MELATI	Jalan ST. MARIAH RT 09 RW 02	8	400/Kep. 071/Kel. JMK/II/2009	28 Juli 2017	K/0 9 Juli 2017
115		2	BKB SERUNI	Jl. Pajagalan RT03/RW03	5			
116		3	BKB SRI ASIH BINA INSANI	Jl. Kopo Citarep Barat	6	SK/VII/Tahun 2017	01 Januari 2017	K/0 Juli 2017
117		4	BKL SRI ASIH	Jl. Citarid Barat RT07 Kel. Kopo	7	09/SK/II/2018	01 Januari 2017	
118	Bojo ngloa kidul	1	BKB MUTIARA HATI	RW 03 Kel. Cibaduyut	7	063 Tahun 2016	20 Januari 2016	
119		2	BKR MUTIARA HATI	RW 03 Kel. Cibaduyut	7	065 Tahun 2016	01 November 2016	
120		3	BKL MUTIARA HATI	RW 03 Kel. Cibaduyut	7	066 Tahun 2016	01 November 2016	
121		4	BKB KADEUDEUH	RW 07 Kel. Situsaeur	6	643/ 010/ - kel/ STSR/ 2016	22 Februari 2016	



Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

NO	KEC AMA TAN	NO	NAMA KELOMPOK	ALAMAT	JUMLAH KADER	NO SK	TGL SK	K0
1	2	3	4	5	6	7	8	9
122	Baba kan cipar ay	1	BKB MELATI	JL. PAGARSIH BARAT	15	018 Tahun 2015	20 Juli 2015	K/0 Agustus 2017
123		2	BKL MAWAR	JL. PAGARSIH BARAT	5	018 Tahun 2015	20 Juli 2015	
124	Band ung kulon	1	BKL MAWAR SARI	JL. Mirabilis RT05/RW04 Kel.Gempolsari	3	17/III/Kel.GS/2015	25 Januari 2015	
125		2	BKB MAWAR SARI	JL. Mirabilis RT05/RW04 Kel.Gempolsari	8			
126	Rego l	1	BKL GLADIUL	Jl. H. Rais RT 04 RW 05 Kel. Balonggede	5	149/Kep. 03-Kel. Blgd/2014	22 Januari 2014	K/0 Agustus 2017
127		2	BKB NUR'INAYAH	RW 08 Kel. Pasirluyu	7	013/ SK.Kel. PSRLY/2017	16 Januari 2017	
128		3	BKR MUDA CERIA	Jl. Pasirluyu RT 05 RW 05	7	014/SK.Kel. PSRLY/2017	31 Januari 2017	
129	Leng kong	1	BKB	Kel. Cikawao	9			K/0 Juli 2017
130		2	BKL	Kel. Cikawao	10			K/0 Juli 2017
131		3	BKL DELIMA	RW 08 Kel. Cikawao	7	30/441/kep/2017	Juli 2017	
132		4	BKB DELIMA	RW 08 Kel. Cikawao	13	441/32/KEP/2017	Juli 2017	
133		5	BKR DELIMA	RW 08 Kel. Cikawao	7	31/441/KEP/2017	Juli 2017	
134		6	BKL BUNGA MATAHARI	Kel. Cikawao	10	16/441/KEP/2017	01 April 2017	
135		7	BKL Nusa Indah RW 06	Kel. Turangga	8	004/-kel. Trg/2016	Agustus 2016	K/0 15 Agustus 2017
136		8	BKL TULIP	Kel. Malabar	7	188.4/8/kep/2017	10 Januari 2017	K/0 Juli 2017
137		9	BKB MAWAR	RW 08 kel. Lingkar Selatan	18	03.1 Tahun 2016	4 Januari 2016	K/0 15 Agustus 2017
138		10	BKB BUNGA MATAHARI	Kel. cikawao	9	441/14/kep/2017	01 April 2017	
139	Batu nung gal	1	BKB MAWAR	JL. TASIKMALAYA	9	14 Tahun 2017	01 Februari 2017	K/0 8 Agustus 2017



Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

NO	KEC AMA TAN	NO	NAMA KELOMPOK	ALAMAT	JUMLAH KADER	NO SK	TGL SK	K0
1	2	3	4	5	6	7	8	9
140	Ujun gber ung	1	BKL CEMPAKA II	Pasirkunci Kel. Pasirjati	8	03 Tahun 2017	3 Januari 2017	K/0 9 Juli 2017
141		2	BKB CEMPAKA II	Pasirkunci Kel. Pasirjati	6	02 Tahun 2017	3 Januari 2017	K/0 9 Juli 2017
142		3	BKB RW.11 Pasirjati	RW.11 Kel. Pasirjati	6	02 Tahun 2017	3 Januari 2017	
143	Kiara cond ong	1	BKB KARTINI	Gg. Sukaresmi RT 06 RW 05	6	35/ SK- KEL / XII/ 2012	28 Desember 2012	
144		2	BKL SUDALI	KPAD PINDAD TIMUR	6	411.2/17/II/2017	2 Januari 2017	
145	Arca mani k	1	BKL MELATI	JL. Cisaranten Kulon RT 02/RW 01 Kel. Cisaranten Kulon	7	421.1/SK Tahun 2017	05 Januari 2017	K/0 5 Januari 2017
146		2	BKB CENDRAWASIH	JL. Ciculang RT01/RW07 Kel. Binaharapan	6	266/SK.PAUDCBH/2017	12 Januari 2017	
147	Cibir u	1	BKL RW 1 KEL. Pasirbiru	RT 1-5 RW 1 KEL. Pasirbiru	5	29/VI/Kep. /2017	30 MEI 2017	K/0 TGL 11 Juli 2017
148		2	BKB TULIP	Jalan Manglayang IV KSB	6	82/VI/ Kep. /2017	31 MEI 2017	K/0 TGL 15 Agustus 2017
149		3	BKB RT 1-5 KEL. Pasirbiru	RT 1-5 RW 1 KEL. Pasirbiru	5	28/VI/ Kep. /2017	30 MEI 2017	K/0 TGL 11 Juli 2017
150		4	BKL DAHLIA	Balai RW 02 KEL. Neglasari	6	123 Tahun 2016	10 Oktober 2016	K/0 TGL 06 Juni 2017
151		5	BKL RW 02	KEL. Neglasari	5	123 Tahun 2016	10 Oktober 2016	K/0 TGL 10 Oktober 2016
152		6	BKL TULIP	Jalan Manglayang IV	6	83/ VI/ kep. /1/2017	30 MEI 2017	K/0 TGL 15 Agustus 2017
153		7	BKB RW. 05 PASIR BIRU	RW.05 Kel. Pasir Biru	9	57 Tahun 2017	23 Nopember 2017	
154	Anta pani	1	BKL SARI ASIH	Jl. Cihaurkuku Kel. Antapani Wetan	6	476/10/Kel-Anwet/2017	10 Juli 2017	K/0 TGL 06 JULI 2017
155		2	BKB SARI ASIH	Jl. Cihaurkuku Kel. Antapani Wetan	8	476/8/Kel-Anwet/2017	16 Mei 2017	K/0 TGL 06 JULI 2017
156	Ranc asari	1	BKB MAWAR 5	RW 05 Kel. Cipamokolan	12	21 TAHUN 2015	04 Mei 2015	
157		2	BKL BINCARUNG	Jalan Saluyu Indah Raya Riung Bandung	6	15 tahun 2017	11 Januari 2017	K/0 15 Agustus 2017



Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

NO	KEC AMA TAN	NO	NAMA KELOMPOK	ALAMAT	JUMLAH KADER	NO SK	TGL SK	K0
1	2	3	4	5	6	7	8	9
158		3	BKB MAWAR 5	Komplek Santosa Asih Jaya Kel. Cipamokolan	7	18/5/Tahun 2015	20 Mei 2015	K/0 14 Agustus 2017
159	Buah batu	1	BKL RIDHO ILAHI	Jalan Antabaru Dalam Kelurahan Margasari	5	08 Tahun 2017	20 Februari 2017	K/0 6 Juli 2017
160		2	BKL MEGABRATA	Komplek Megabrata Kel. Margasari	6	025 Tahun 2016	10 Juli 2017	K/0 6 Juli 2017
161		3	BKR HARAPAN TANGGUH	Jalan Antabaru Dalam Kelurahan Margasari	5	07 Tahun 2017	20 Februari 2017	K/0 6 Juli 2017
162		4	BKB MEGABRATA	Komplek Megabrata Kel. Margasari	5	024 Tahun 2016	10 Juli 2016	K/0 6 Juli 2017
163		5	BKB KASIH IBU	Galaxy Raya Margahayu Raya Barat Kelurahan Sekejati	6	04 Tahun 2017	18 Januari 2017	K/0 10 Juli 2017
164		6	BKB KENANGA	RW 02 Kelurahan Jatisari	13	11 Tahun 2013	20 Februari 2017	
165		7	BKB TUNAS SEHAT	Komplek Antabaru Dalam Kelurahan Margasari	6	06 Tahun 2017	20 Februari 2017	K/0 6 Juli 2017
166		8	BKR MAWAR	RW 11 KEL SEKEJATI	4	02 TAHUN 2019	11 JANUARI 2019	
167		9	BKR TULIP	RW 04 KEL JATISARI	6	04 TAHUN 2019	12 April 2019	
168		10	BKR REMAJA GEMPITA	RW 04 KEL MARGASARI	8	19 TAHUN 2018	14 JULI 2018	
169	Band ung kidul	1	BKL MELATI	Jl. Kujangsari	7	033 Tahun 2005	02 Januari 2005	K/0 TGL 06 JULI 2017
170		2	BKB MELATI III	Jl. Pasantren kel. Kujangsari	9	021 Tahun 2005	02 Januari 2005	K/0 TGL 06 JULI 2017
171		3	BKL CEMPAKA	Jl. Sekelimus kel. Batununggal	6	4/SK.BKL//KEL.BTG.2017		K/0 TGL 06 JULI 2017
172		4	BKL CEMPAKA 10	Jl. Batununggal	2	4/SK.BKL//KEL.BTG.2017		K/0 TGL 06 JULI 2017
173		5	BKL BOUGENVILLE	Jl. Sekelimus kel. Batununggal	6	4/SK.BKL//KEL.BTG.2017		K/0 TGL 06 JULI 2017
174		6	BKL GLAMOUR	Jl. Sekelimus kel. Batununggal	5	4/SK.BKL//KEL.BTG.2017		K/0 TGL 06 JULI 2017
175		7	BKL CEMPAKA 4	Jl. BNI RW 04 Batununggal	5	4/SK.BKL//KEL.BTG.2017		K/0 TGL 06 JULI 2017
176		8	BKL NUSA INDAH 4	Jl. Terusan Batununggal kel. Mengger	7	11/SK.BKL/3/KEL.MENGGER/2007		K/0 TGL 06 JULI 2017



Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

NO	KECAMATAN	NO	NAMA KELOMPOK	ALAMAT	JUMLAH KADER	NO SK	TGL SK	K0
1	2	3	4	5	6	7	8	9
177		9	BKL MELATI 5	Jl. H. Bardan Komp. Jakapurwa	7	022 Tahun 2005		K/0 TGL 06 JULI 2017
178		10	BKL MELATI VI	Jl. Gotong Royong kel. Kujangsari	8	022 Tahun 2005		K/0 TGL 06 JULI 2017
179		11	BKL MELATI IV	Jl. Terusan Logam kel. Kujangsari	8	022 Tahun 2005		K/0 TGL 06 JULI 2017
180		12	BKL MELATI III	Jl. CIPARAY	6	022 Tahun 2005		K/0 TGL 06 JULI 2017
181		13	BKR ARROHMAH	Jl. Mengger	5	05/SK.BKR/mengger/2007		K/0 TGL 06 JULI 2017
182		14	BKR MELATI IV	Jl. Ciparay Kel. Kujangsari	10	21/SK.BKR/kjg2005		K/0 TGL 06 JULI 2017
183		15	BKB BOUGENVILLE VII	RW 07 Kel. Batununggal	8			K/0 TGL 06 JULI 2017
184		16	BKB MELATI III	Jl.Pasantren Kel. Kujangsari	9	021 Tahun 2005		K/0 TGL 06 JULI 2017
185		17	BKB MELATI IV	Jl. Ciparay RT01/RW04 Kel. Kujangsari	8	021 Tahun 2005		K/0 TGL 06 JULI 2017
186		18	BKB MELATI V	Jl. H. Bardan Kel. Kujangsari	7	021 Tahun 2005		K/0 TGL 06 JULI 2017
187		19	BKB MELATI VI	Gg. Gotongroyong RT03/RW06 kel.Kujangsari	9	021 Tahun 2005		K/0 TGL 06 JULI 2017
188		20	BKB NUSA INDAH II	RW 02 MENGGER	9			K/0 TGL 06 JULI 2017
189		21	BKB NUSA INDAH IV	Jl. Batununggal Kel. Mengger	9			K/0 TGL 06 JULI 2017
190	Gedebage	1	BKL MELATI	Rancasagatan RT 03 RW 01 Kel. Cisaranten Kidul	10	0016-2017	9 Januari 2017	K/0 9 Januari 2017
191		2	BKB MELATI	Kel. Cisaranten Kidul	8	463/Kep. 001.-Kel. CK/II/2010	4 Januari 2017	
192		####	BKB MELATI	Jalan Cempaka RT 04 RW 07 Kel. Rancabolang	8		11 Januari 2017	
193	Panyileukan	1	BKR SOKA RW 9	Jalan Panutan Raya Kel. Cipadung Kulon	5	15 Tahun 2017	1 Agustus 2017	K/0 TGL 01 Agustus 2017
194		2	BKL SOKA 7	Jalan Pangaritan Kel. Cipadung Kulon	7	33 Tahun 2017	23 Maret 2017	K/0 14 Agustus 2017



Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

NO	KEC AMA TAN	NO	NAMA KELOMPOK	ALAMAT	JUMLAH KADER	NO SK	TGL SK	K0
1	2	3	4	5	6	7	8	9
195		3	BKL MEKAR INDAH 1	Jl. Pamekar Barat Kel. Mekar Mulya	7	16 Tahun 2017	20 Juli 2017	K/0 Juli 2017
196		4	BKL SOKA 9	Jl. Panutan Raya Krl. Cipadung Kulon	5	14 Tahun 2107	1 Agustus 2017	K/0 TGL 01 Agustus 2017
197		5	BKR SOKA 7	Jl. Pangaritan Kel. Cipadung Kulon	8	7 Tahun 2017	14 Februari	K/0 TGL 14 Februari 2017
198		6	BKB MAWAR	AC I No. 10 RT 02 RW 13 KEL. Cipadung Kidul	8	047 Tahun 2017	18 Januari 2017	K/0 TGL 18 Januari 2017
199		7	BKL MAWAR	Komplek Panyileukan Citra RW 13 KEL. Cipadung Kidul	14	048 Tahun 2017	18 Januari 2017	K/0 TGL 18 Januari 2017
200	Cina mbo	1	BKL DAHLIA	Bebedahan RW 03 Kel. Babakan Penghulu	7	449/SK/10/BPH/2017	23 Maret 2017	
201		2	BKB MUTIARA INSAN	Bebedahan RW 03 Kel. Babakan Penghulu	18	1476/01-SK/BBKPHL/II/2016	14 Januari 2016	
202	Man dalaj ati	1	BKB MITRA KASIH BUNDA	Jalan Suka Asih RT 01 RW 08 Kel. Sindang Jaya	8	148/003/XII-Kel. Sindang Jaya/ Tahun 2015	14 Desember 2015	K/0 15 Agustus 2017
203		2	BKL RW 08 SUKA ASIH	RW 08 Sindang Jaya	8	148/005/XII-Kel. Sindang Jaya/ Tahun 2015	14 Desember 2015	
204		3	BKR BUDI ASIH	RW 09 KEL SINDANGJAYA	7	149/486/SK.BKR/Kel.sdjy/2018	02 November 2017	
205		4	BKR ANYELIR	RW 06 KEL SINDANGJAYA	8	149/486/SK.BKR/Kel.sdjy/2018	02 November 2017	
206		5	BKR ASTER	RW 07 KEL SINDANGJAYA	7	149/486/SK.BKR/Kel.sdjy/2018	02 November 2017	
207		6	BKR SAKURA	RW 08 KEL SINDANGJAYA	7	149/486/SK.BKR/Kel.sdjy/2018	02 November 2017	



Sasaran 4

Meningkatnya Pengendalian Penduduk

Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.9
Analisis Pencapaian Sasaran 4
Meningkatnya Pengendalian Penduduk

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Cakupan Data dan Informasi Kependudukan yang Akurat dan Tepat Waktu	%	100	100	100.00	100	100	100.00

Sasaran Meningkatnya Pengendalian Penduduk dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Cakupan Data dan Informasi Kependudukan yang Akurat dan Tepat Waktu" adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Tahun 2020 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Cakupan Data dan Informasi Kependudukan yang Akurat dan Tepat Waktu" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana maka capaian kerjanya mencapai 100.00 %.

Sasaran Meningkatnya Pengendalian Penduduk dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator sasaran 4 "Cakupan Data dan Informasi Kependudukan yang Akurat dan Tepat Waktu" adalah sebesar 100 % dari target sebesar 100 % yang ditetapkan dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kinerja dapat tercapai. Capaian Tahun 2020 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator Cakupan Data dan Informasi Kependudukan yang Akurat dan Tepat Waktu tahun ini adalah sebesar 100.00 %,



yang merupakan nilai capaian yang sama dengan Tahun 2019 sebesar 100 % di Tahun 2019.

Adapun faktor pendukung tercapainya sasaran kinerja Meningkatnya Meningkatnya Pengendalian Penduduk pada tahun 2020, antara lain :

1. Dengan adanya system dan aplikasi dari BKKBN yang selama ini dipergunakan sangat membantu dalam pengelolaan data dari petugas lini lapangan, namun memang belum bisa disiapkan data yang secara khusus dapat mengakomodir kebutuhan data khusus Kota Bandung, sehingga perlu dikembangkan secara khusus aplikasi untuk Kota Bandung terkait pengelolaan data dari lini lapangan dan para kader.
2. Adanya wabah pandemi Covid19 yang secara langsung berpengaruh dalam APBD sehingga dilakukan refocusing dengan nilai yang signifikan, namun data dapat tetap tersajikan dengan akurat dan tepat dan tepat waktu.
3. Terberdayakannya para petugas penyuluh di Lini Lapangan dan para kader di masyarakat yang berpengaruh besar atas tercapainya sasaran, dimana mereka merupakan ujung tombak sebagai penggerak program KB di tingkat RW sampai di tingkat Kecamatan dengan penyampaian data yang mereka sampaikan.



Sasaran 5

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Pencapaian sasaran 5 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.10
Analisis Pencapaian Sasaran 5
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	70	83.70	111.60	70	87.10	124.43

Sasaran Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat" adalah sebesar 87.10 dari target sebesar 70 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 124.43 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat" tahun ini meningkat 12.83 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 111.60

Tahun 2020 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat" tahun ini adalah sebesar 124.43 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana maka capaian kerjanya mencapai 87.10 %.

Sasaran Meningkatnya Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat baik dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator sasaran 5 "Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat baik" adalah sebesar 87.10% dari target sebesar 85% yang ditetapkan dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kinerja dapat mencapai 87.70 %, capaian ini melebihi target yang telah ditetapkan. Tahun 2020 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat baik"



tahun ini adalah sebesar 83.10. %, berhasil memenuhi target akhir renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.

Adapun faktor pendukung tercapainya sasaran kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2020, antara lain :

1. Adanya upaya dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terkait Keluarga Berencana, Ketahanan Keluarga dan Data dan Informasi Kependudukan.
2. Adanya dukungan sarana dan prasarana penunjang kinerja dinas, salah satunya yang bersumber dari bantuan Dana Alokasi Khusus Fisik berupa penyediaan sarana prasarana penunjang operasional tenaga lini lapangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
3. Adanya dukungan sarana dan prasarana yang bersumber dari APBD dalam menunjang kelancaran operasional dan administrasi perkantoran.

D. Realisasi Kinerja dan Anggaran

Realisasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp. 9.259.231.679.00 dari anggaran sebesar Rp. 11.565.289.821.00 bila di persentasikan sebanyak 80.06% capaian anggaran di tahun 2020, sedangkan pada tahun sebelumnya tercapai realisasi anggaran sebanyak 75.79%, terjadi peningkatan persentase capaian anggaran sebanyak 5% pada tahun 2020.

Usuran/Bidang/Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Output	Target Output	Realisasi Output
Usuran Wajib Non Pelayanan Dasar						
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11,565,289,821	9,259,231,679	80.06%			
Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana (APBD + APBN)	11,565,289,821	9,259,231,679	80.06%			
Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana (APBD)	6,031,429,821	5,604,541,149	92.92%			



Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Output	Target Output	Realisasi Output
Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana (APBN)	5,533,860,000	3,654,690,530	66.04%			
SASARAN 5 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat						
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,900,938,405	1,840,876,555	96.84%	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	117,319,200	92,111,425	78.51%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	1 laporan	1 laporan
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	148,659,500	141,102,200	94.92%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	1 laporan	1 laporan
Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	10,250,000	10,250,000	100.00%	Jumlah Unit Peralatan Kerja Yang Diperbaiki	1 laporan	1 laporan
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	194,593,500	194,593,500	100.00%	Jumlah Laporan Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 laporan	1 laporan
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	58,472,200	58,472,000	100.00%	Jumlah Laporan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 laporan	1 laporan
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	10,241,500	10,241,500	100.00%	Jumlah Laporan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1 laporan	1 laporan
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-		Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 laporan	1 laporan
Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	23,194,700	23,071,900	99.47%	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 laporan	1 laporan
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	37,872,000	37,872,000	100.00%	Jumlah Laporan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	1 laporan	1 laporan
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	183,820,000	179,109,400	97.44%	Jumlah Laporan Penyediaan Makanan dan minuman	1 laporan	1 laporan



Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Output	Target Output	Realisasi Output
Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	162,636,285	140,175,990	86.19%	Jumlah Laporan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1 laporan	1 laporan
Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	548,087,520	548,087,520	100.00%	Jumlah Laporan Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran / teknis perkantoran	1 laporan	1 laporan
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	405,792,000	405,789,120	100.00%	Jumlah Laporan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi	1 laporan	1 laporan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	754,422,300	701,371,970	92.97%	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	100%	100%
Kegiatan Pengadaan Mebeulair	-	-		Jumlah Laporan Pengadaan Mebeulair	1 laporan	1 laporan
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	-	-		Jumlah Laporan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	1 laporan	1 laporan
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	49,472,300	49,471,970	100.00%	Jumlah Laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 laporan	1 laporan
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	704,950,000	651,900,000	92.47%	Jumlah Laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1 laporan	1 laporan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-				
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	-	-		Jumlah Laporan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	1 laporan	1 laporan
Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	-	-		Jumlah Laporan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	1 laporan	1 laporan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	116,264,000	115,660,900	99.48%	-	-	-
Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	116,264,000	115,660,900	99.48%	Jumlah Laporan Kegiatan Peningkatan Kinerja Aparatur	1 laporan	1 laporan



Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Output	Target Output	Realisasi Output
Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	48,264,500	48,051,680	99.56%	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Tahunan, Triwulanan dan bulanan	20 Dok	20 Dok
Pengembangan Database Terpadu dan Sistem Informasi Perangkat Daerah	48,264,500	48,051,680	99.56%	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Tahunan, Triwulanan dan bulanan	20 Dokumen	20 Dokumen
Program Keluarga Berencana	1,834,428,000	1,619,280,530	88.27%	Persentase Peserta KB Aktif	73.00%	76.24%
Kegiatan Bantuan Operasional KB (DAK Non Fisik)	512,932,000	353,986,389	69.01%	Jumlah Laporan Kegiatan Manajemen BOKB	1 laporan	1 Laporan
Kegiatan Sub Bidang KB (DAK Fisik)	1,321,496,000	1,265,294,141	95.75%	Jumlah Laporan Pelaksanaan Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	1 laporan	1 Laporan
SASARAN II Meningkatnya Keluarga Berencana				Persentase Peserta KB Aktif	73.00%	76.24%
Program Keluarga Berencana	316,820,000	310,840,000	98.11%	Persentase Peserta KB Aktif	73.00%	76.24%
Kegiatan Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana	39,000,000	33,800,000	86.67%	Jumlah peserta KB baru	2750 Org	3410 Org
Kegiatan Bantuan Operasional KB (DAK Non Fisik)	213,120,000	212,940,000	99.92%	Jumlah Laporan Kegiatan BOKB Penanganan Stunting	1 laporan	1 Laporan
Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kepesertaan KB	-	-		Jumlah Motivator Akseptor KB Lestari	90 Pasangan Akseptor	90 Pasangan Akseptor
Kegiatan Pengadaan dan Pengendalian Distribusi Alat Obat Kontrasepsi	64,700,000	64,100,000	99.07%	Jumlah Fasyankes yang mendapatkan Distribusi, Alat, Obat dan Kontrasepsi	85 Faskes	85 Faskes
Program Keluarga Berencana	576,822,000	136,080,000	23.59%	Persentase Peserta KB Aktif	73.00%	76.24%
Kegiatan Bantuan Operasional KB (DAK Non Fisik)	576,822,000	136,080,000	23.59%	Jumlah Laporan Kegiatan BOKB Lokakarya mini Tingkat Desa dan Kecamatan di Kampung KB	1 laporan	1 Laporan
Program Keluarga Berencana	2,421,240,000	1,341,540,000	55.41%	Persentase Peserta KB Aktif	73.00%	76.24%
Kegiatan Bantuan Operasional KB (DAK Non Fisik)	2,421,240,000	1,341,540,000	55.41%	Jumlah Laporan Kegiatan BOKB	1 laporan	1 laporan
Program Keluarga Berencana	488,250,000	344,850,000	70.63%	Persentase Peserta KB Aktif	73.00%	76.24%



Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Output	Target Output	Realisasi Output
Kegiatan Bantuan Operasional KB (DAK Non Fisik)	488,250,000	344,850,000	70.63%	Jumlah Laporan kegiatan BOKB Ketahanan Keluarga Berbasis Kelompok Tribina	1 laporan	1 laporan
SASARAN IV Meningkatnya Pengendalian Penduduk				Cakupan Data dan Informasi Kependudukan yang Akurat dan Tepat Waktu	100%	100%
Program Pengendalian Penduduk	30,650,000	25,874,000	84.42%	Cakupan Data dan Informasi Kependudukan yang Akurat dan Tepat Waktu	100%	100%
Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Penduduk dan Keluarga	4,700,000	3,800,000	80.85%	Jumlah Dokumen Penyusunan Data dan Informasi Penduduk dan Keluarga	12 Dokumen	12 Dokumen
Kegiatan Perumusan Penyebaran Penduduk dan Keluarga	3,600,000	3,600,000	100.00%	Draft Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk	1 Dokumen	1 Dokumen
Kegiatan Pembinaan Kawasan Kependudukan	22,350,000	18,474,000	82.66%	Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan Pembinaan Kawasan Kependudukan	1 Sekolah	1 Sekolah
SASARAN I Meningkatnya Promosi Keluarga Berencana				- Jumlah peserta KB baru - Jumlah Kampung KB Aktif	- 2625 org - 31 Kampung KB	- 3410 org - 31 Kampung KB
Program Promosi Keluarga Berencana	2,614,172,760	2,326,421,340	88.99%	Jumlah Kampung KB Aktif	31 Kampung KB	31 Kampung KB
Kegiatan Advokasi dan Penggerakan	68,570,000	66,700,000	97.27%	Jumlah Kampung KB yang di Advokasi & digerakan	31 Kampung KB	31 Kampung KB
Kegiatan Pendayagunaan Penyuluh dan Kader KB	1,502,720,000	1,497,461,000	99.65%	Persentase Petugas Pembantu Pembina KB Desa/Kelurahan	100 persen	100 persen
				Persentase PKB dan PLKB yang didayagunakan	100 persen	100 persen
Kegiatan Penyuluhan, Komunikasi, dan Edukasi (KIE) (DID)	1,042,882,760	762,260,340	73.09%	Jumlah Kegiatan Penyuluhan, Komunikasi dan Edukasi (KIE)	30 kegiatan	30 kegiatan
				Penanganan Covid-19	30 Kegiatan	30 Kegiatan
				Jumlah Kampung KB yang dibina	15 kpg	15 kpg
SASARAN III Meningkatnya Ketahanan Keluarga				Persentase Kelompok Tribina Aktif	74.56 %	74.73 %
Program Ketahanan Keluarga	463,017,856	448,384,704	96.84%	Persentase Kelompok Tribina Aktif	74.56 %	74.73 %
Kegiatan BKB, BKL, dan BKR	112,589,856	112,587,204	100.00%	Jumlah Kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL) yang Mendapatkan Pembinaan	11 Kelompok	11 Kelompok



Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Output	Target Output	Realisasi Output
Kegiatan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	56,500,000	56,500,000	100.00%	Jumlah Pembinaan Kelompok UPPKS yang ber-KB Mandiri	36 Kelompok	36 Kelompok
Kegiatan Ketahanan Remaja	293,928,000	279,297,500	95.02%	Jumlah Kelompok PIK R yang Dibina	75 Kelompok	75 Kelompok



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun 2020 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun 2020 Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun 2020 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2020 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung menetapkan sebanyak 5 (lima) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 129.56 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 104.44 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.23 %
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %
- Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 124.43 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 5 sasaran tersebut, secara umum telah melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2020 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung dalam rangka



mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 11.565.289.821 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 9.259.231.679, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2020 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 2.306.058.142

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung 2019-2023 menetapkan sebanyak 5 (lima) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 2 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2020, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 129.56 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 104.44 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.23 %
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %
- Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 124.43 %

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 11.565.289.821 (sebelas milyar lima ratus enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung adalah 80.06 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bandung.



Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA).

Bandung, 31 Desember 2020

Kepala DPPKB Kota Bandung



Drs. H.ANDRI DARUSMAN, M.Si

NIP. 196811151988031005